



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

# KAJIAN FISKAL REGIONAL



**Triwulan I**

**2018**

**KANWIL DITJEN  
PERBENDAHARAAN**  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Penyusun :  
Penanggung Jawab : Mercy Monika R. Sitompul  
Ketua Tim : Muchamad Rifai  
Editor : Albert Immanuel Gintin  
Desain Grafis : Novita Endah Hasibuan  
Anggota : Pegawai Bidang PPA II



## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat, karunia, serta taufik dan hidayahNya maka Flash Report Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun Anggaran 2018 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera dapat terselesaikan.

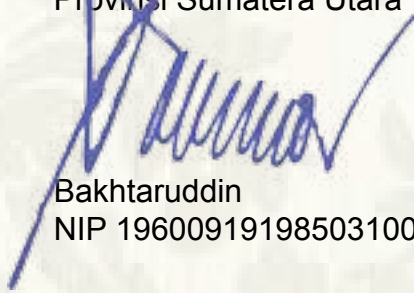
Flash report KFR triwulan I ini diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi fiskal, yang berasal dari pelaksanaan APBN maupun APBD; memberikan analisis parsial berdasarkan kondisi arus kas masuk dan arus kas keluar serta menggambarkan isu strategis atau berita terpilih yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap fiskal daerah Sumatera Utara.

PDRB Sumatera Utara pada triwulan I sebesar Rp. 177,62 triliun menunjukkan sinyal positif atas menggeliatnya aktivitas perekonomian. Peningkatan PDRB menggambarkan pertumbuhan ekonomi sebesar -4,01 % (q-to-q) atau 4,71% (y-on-y). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Sumatera Utara termasuk baik jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan karena aktivitas perekonomian masih lambat di awal tahun, baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta. Pengeluaran pemerintah yang menurun tajam sangat mempengaruhi pencapaian PDRB .

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyediaan data dan informasi yang diperlukan. Kami menyadari bahwa cakupan serta kualitas kajian ini masih perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang berkepentingan, serta mengharapkan kiranya kerjasama yang sangat baik dengan berbagai pihak selama ini dapat ditingkatkan di masa mendatang.

Besar harapan kami, dengan segala keterbatasan yang ada, semoga Flash Report KFR ini dapat memberi manfaat dan kontribusi dalam pengelolaan fiskal di di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Medan, 15 Mei 2018  
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan  
Provinsi Sumatera Utara

  
Bakhtaruddin  
NIP 1960091919850310003

## DAFTAR ISI

<b>I</b>	<b>PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL</b>	
	A. Produk Domestik Regional Bruto	1
	B. Inflasi	3
	C. Indikator Kesejahteraan	4
<b>II</b>	<b>PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN</b>	
	A. Pendapatan Negara	8
	B. Belanja Negara	14
	C. Prognosis Realisasi APBN	18
<b>III</b>	<b>PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD</b>	
	A. Pendapatan Daerah	20
	B. Belanja Daerah	22
	C. Prognosis Realisasi APBD	23
<b>IV</b>	<b>PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN ( APBN DAN APBD)</b>	
	A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian	24
	B. Pendapatan Konsolidasian	24
	C. Belanja Konsolidasian	26
<b>V</b>	<b>BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH</b>	
	A. Kapal Pesiar Dream Cruise, <i>is not A Dream Anymore</i>	28
	B. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Dulu dan Sekarang	29

# I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

## A. Produk Domestik Regional Bruto

Grafik I.1 : PDRB Sumatera Utara Per Triwulan 2017 – 2018

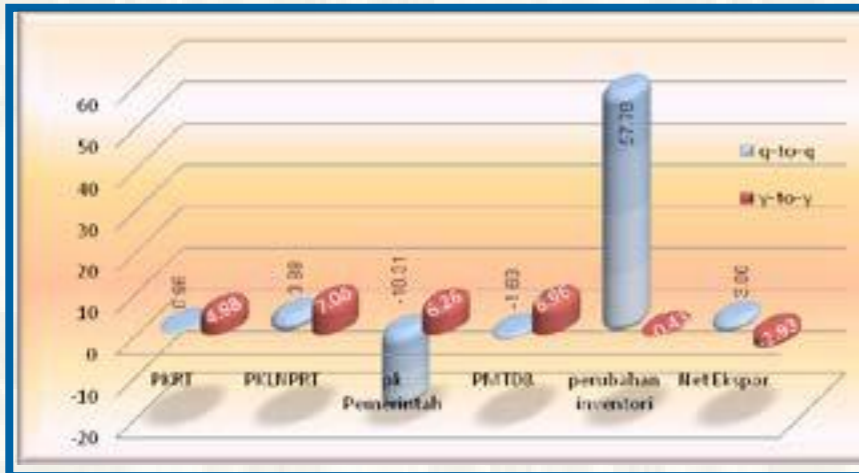


Sumber : BPS Prov. Sumut (diolah)

“PDRB Sumatera Utara pada triwulan I sebesar Rp. 177,62 triliun (atas harga dasar berlaku) dan Rp. 124,06 triliun (atas harga konstan),

PDRB Sumatera Utara pada triwulan I sebesar Rp. 177,62 triliun (atas harga dasar berlaku) dan Rp. 124,06 triliun atas harga konstan. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), perekonomian Sumatera Utara tumbuh 4,73%. Namun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to q) mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,41 persen. Pertumbuhan negatif disebabkan karena aktivitas perekonomian yang cenderung melambat baik di sektor pemerintah maupun swasta. Pengeluaran pemerintah yang menurun drastis pada triwulan I, berbanding terbalik dengan triwulan sebelumnya yang merupakan puncak pengeluaran pemerintah. Demikian juga dengan sektor swasta yang selalu melonjak di akhir tahun.

Grafik 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Menurut Pengeluaran triwulan I 2018 (persen)



Sumber : BPS Prov. Sumut (diolah)

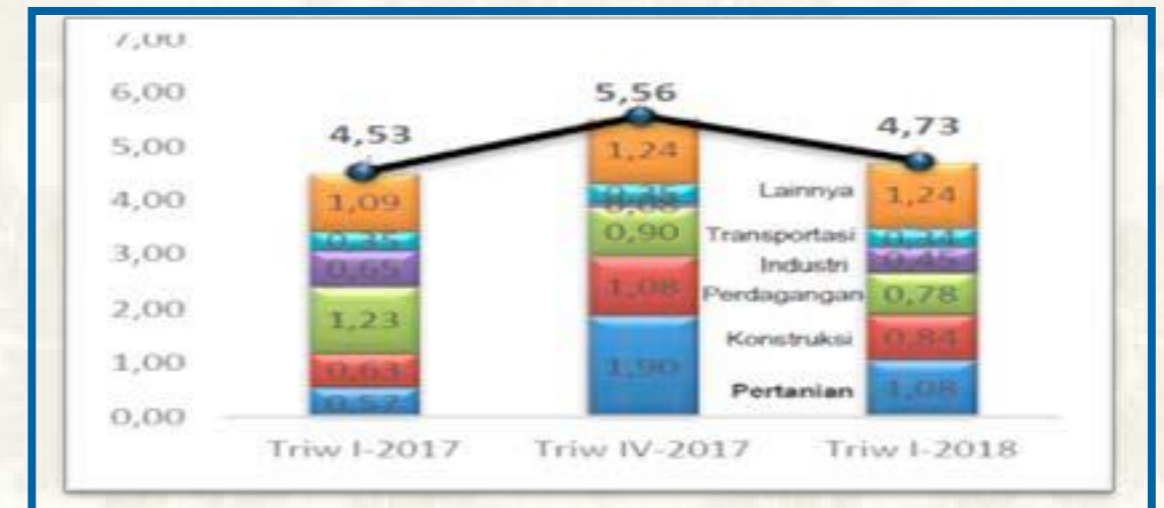
Gambar 1.2 menggambarkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menurut pengeluaran pada triwulan I tahun 2018 dibandingkan triwulan I tahun 2017 (y-on-y) serta triwulan IV tahun 2014. Pertumbuhan positif terjadi di beberapa

komponen pengeluaran lapangan usaha diantaranya pengeluaran konsumsi LNPRT, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), pengeluaran konsumsi pemerintah, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga, sedangkan komponen perubahan inventori dan net ekspor menunjukkan pertumbuhan negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian masih menunjukkan signal positif.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2018 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami pertumbuhan negatif kenaikan sebesar 0,41 %. Komponen pengeluaran yang menjadi penyumbang pertumbuhan negatif adalah pengeluaran pemerintah yang mengalami pertumbuhan negatif paling besar yakni minus 18,31%. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah di Sumatera Utara pada akhir tahun mempunyai peranan yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian, dimana pengeluaran pemerintah yang mengalami lonjakan pada akhir tahun baik belanja barang maupun belanja modal. Sedangkan pada awal tahun 2018, pengeluaran pemerintah masih sangat rendah.

Jika ditinjau dari aspek produksi, pada triwulan I tahun 2018 struktur perekonomian Sumatera Utara didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,65 %; industri pengolahan sebesar 20,34 %; serta perdagangan besar-eceran dan sepeda motor sebesar 18,09 %. Ketiga lapangan usaha tersebut berperan hingga 60,08 % dari total PDRB Sumatera Utara

Grafik 1.3. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha TRW I-2017, TRW-IV-2017 dan TRW I-2018

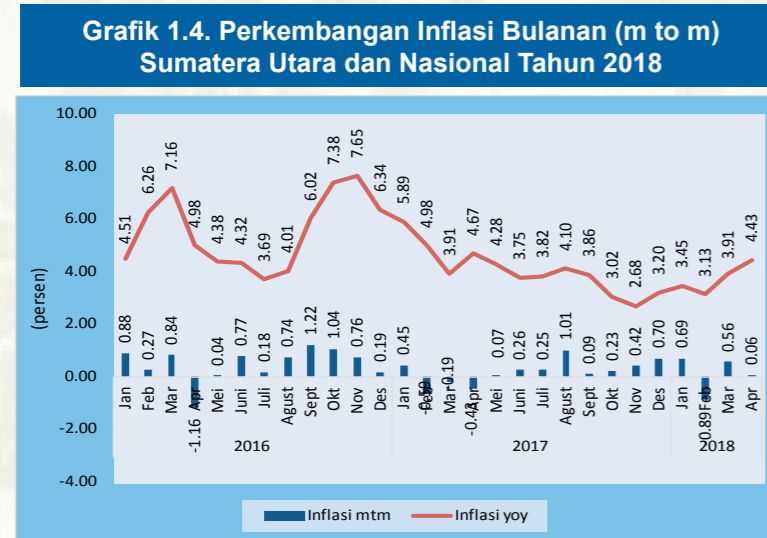


Sumber : BPS Prov. Sumut, 2018

Grafik 1.3 menggambarkan pada triwulan ini hampir semua lapangan usaha mengalami kenaikan. Bila dibandingkan secara y-on-y, kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,73 persen, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,08 %, selanjutnya konstruksi sebesar 0,84 %: dan perdagangan besar- eceran dan reparasi mobil - sepeda motor sebesar 0,78 %

## B. Inflasi

Provinsi Sumatera terdapat 4 kota yang dijadikan perhitungan inflasi, yaitu Medan, Pematang Siantar, Sibolga, dan Padang Sidempuan. Pada bulan Maret 2018, seluruh kota IHK di Sumatera Utara mengalami inflasi, yaitu Sibolga sebesar 0,79 persen ; Pematangsiantar sebesar 0,17 persen; Medan sebesar 0,61persen; dan



Sumber : BPS Prov. Sumut , 2018

dan Padangsidempuan sebesar 3,25 persen. Sementara itu, inflasi year on year untuk Sumatera Utara sebesar 3,91persen. Hal ini sejalan dengan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama dua tahun sebelumnya, kondisi ini menggambarkan trend yang kurang baik. Triwulan I 2017 menunjukkan trend menurun. Sedangkan apabila dibandingkan dengan inflasi tingkat nasional, inflasi Sumatera Utara triwulan I lebih rendah, baik tingkat inflasi maupun deflasinya. Hal ini berbeda dengan periode dua tahun sebelumnya, dimana kondisi Sumatera Utara selalu lebih baik dari kondisi nasional.

Penyumbang utama komponen inflasi triwulan I Sumatera Utara sebagian besar adalah komoditi bumbu-bumbuan. Hal ini tercermin dari peningkatan inflasi kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dan kelompok transportasi. Tarif listrik dan biaya perpanjangan STNK yang mengalami kenaikan pada bulan maret juga menjadi komoditi utama penyumbang inflasi. Di sisi lain, pola konsumsi cabai masyarakat ikut mempengaruhi tingkat inflasi. Sebagaimana diketahui, konsumsi cabai merah di Sumatera Utara menjadi salah satu komponen penyumbang yang utama yang mempengaruhi tingkat inflasi. Sehingga tak jarang gangguan terhadap pasokan dan distribusi kontribusi ini sangat memberikan pengaruh yang signifikan.

Secara keseluruhan untuk tahun kalender sampai dengan September 2017, kota Padangsidempuan mengalami inflasi paling rendah sebesar 0,40 persen (m-to-m) namun pada perhitungan inflasi tahun kalender di bulan yang sama justru yang paling tinggi tingkat inflasinya. Begitupun, tingkat inflasi sumatera utara sebesar 1,82 persen masih lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 2,66 persen.

## C. Indikator Kesejahteraan

### 1. Tenaga Kerja

**Tabel 1.1. Tabel Status Keadaan Ketenagakerjaan Sumatera Utara 2017 - 2018**

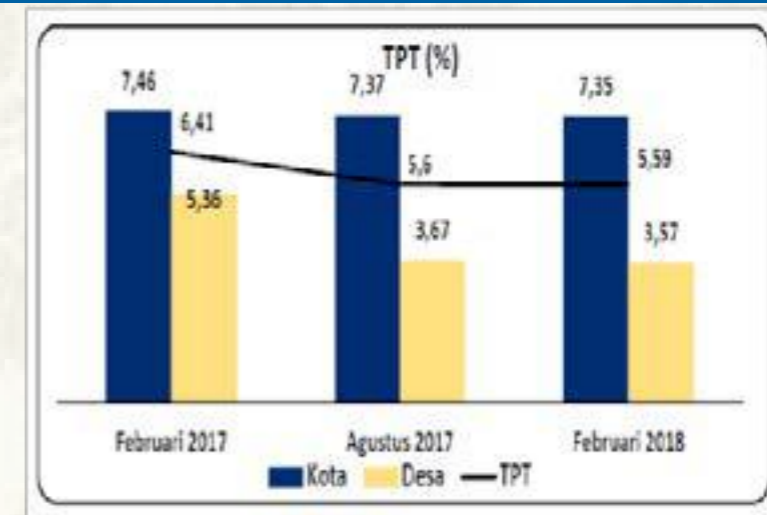
Status Keadaan Ketenagakerjaan (1)	Satuan (2)	Feb 2017 (3)	Agust 2017 (4)	Feb 2018 (5)
1 Angkatan Kerja	Ribuan Orang	6.716	6.743	7.227
- Bekerja	Ribuan Orang	6.200	6.360	6.823
- Pengangguran terbuka	Ribuan Orang	430	377	403
2 Bukan Angkatan Kerja	Ribuan Orang	2.000	3.046	2.623
3 Penduduk Usia Kerja	Ribuan Orang	9.716	9.789	9.850
4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,13	68,88	73,36
5 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,41	5,60	5,59
6 Pekerja Tidak Tetap	Ribuan orang	520	566	546
- Sambilan	Ribuan orang	520	566	546
- Menganggur	Ribuan orang	1.470	1.348	1.621
- Paruh waktu	Ribuan orang	1.470	1.348	1.621

Sumber : BPS Prov. Sumut , 2018

Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja pada Februari 2018 sebanyak 7,23 juta orang. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 483 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus 2017. Sedangkan jika dibandingkan dengan kondisi bulan february tahun 2017, mengalami kenaikan 510 ribu orang

Dari jumlah angkatan kerja tersebut, penduduk yang bekerja pada Februari 2018 sebanyak 6,82 juta orang. Jumlah ini mengalami kenaikan 457 ribu orang jika dibandingkan keadaan semester lalu dan. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun lalu, bertambah 537 ribu orang. Meskipun secara absolut jumlah pengangguran mengalami peningkatan sekitar 26 ribu orang dibanding semester lalu, namun dari sisi persentase jumlah pengangguran mengalami penurunan menjadi 5,59% dari sebelumnya 6,41%. Hal ini menunjukkan berbagai program pemerintah berhasil menurunkan tingkat pengangguran

**Grafik I. 5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2017 - 2018**



Sumber : BPS Prov. Sumut , 2018

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menunjukkan penurunan dari 6,41 % pada Februari 2017 menjadi 5,59 % pada Februari 2018, baik di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini merupakan dampak dari berbagai kebijakan pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja.

TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT di pedesaan. Kondisi ini tak lepas dari penyaluran dana desa yang berhasil menciptakan lapangan kerja secara signifikan di pedesaan. Terlebih jumlah dana yang dikucurkan pemerintah ke desa jumlahnya semakin meningkat, baik dari dana desa maupun alokasi dana desa.

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Februari 2018, Sektor Pertanian menyerap tenaga kerja terbesar sebanyak 2,66 juta orang (38,95 %), diikuti oleh Sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan masing-masing sebanyak 1,32 juta orang (19,34 %) dan 567 ribu orang (8,31%). Hal ini sejalan dengan sektor pertanian dan perkebunan sebagai kontributor terbesar penyumbang PDRB Sumatera Utara

## 2. Kemiskinan

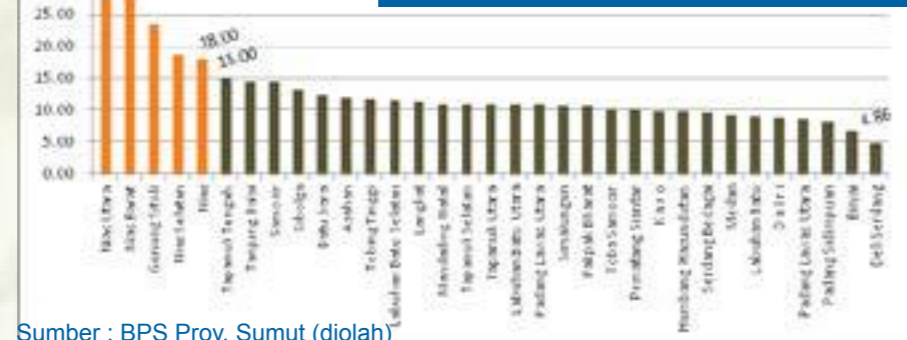
**Grafik 1.6. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2015 - 2017**



Sumber : BPS Prov. Sumut (diolah)

Jumlah penduduk miskin atau penduduk yang berada di garis kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada periode September 2017 adalah 1.326,57 ribu jiwa atau sekitar 9.28% turun sebesar 0.94 point dibandingkan persentase penduduk miskin Maret 2017 yang berjumlah 1.453,87 ribu jiwa atau sekitar 10.22%. Tingkat kemiskinan pada bulan September 2017 tersebut merupakan tingkat terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan dari program pemerintah seperti menggerakkan sektor real melalui sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Dana Desa, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan serta Dana Perimbangan Daerah (DAU dan DAK) yang semakin meningkat.

**Grafik 1.7. Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara Tahun 2016**



Sumber : BPS Prov. Sumut (diolah)

Persentase penduduk miskin antar kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi. Persentase penduduk miskin paling rendah adalah Kabupaten Deli Serdang (4,86%) dan tertinggi adalah Kabupaten Nias Utara (30, 92%). Persentase penduduk miskin seluruh Kabupaten/ Kota di Pulau Nias di atas 15%, sedangkan rata-rata untuk kabupaten lainnya berada di kisaran 10%.

## 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

**Tabel 1. 2  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara  
Menurut Komponen, 2010 - 2017**

Komponen	Setuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	67,46	67,63	67,81	67,94	68,04	68,29	68,33	68,37
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,82	11,83	11,97	12,41	12,61	12,82	13,00	13,10
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,51	8,61	8,72	8,79	8,93	9,03	9,12	9,25
Pengeluaran per Kapita	Rp.000	9.196	9.231	9.266	9.309	9.391	9.563	9.744	10.036
IPM		67,09	67,34	67,74	68,38	68,87	69,51	70,00	70,57
Pertumbuhan IPM	%	-	0,37	0,59	0,94	0,72	0,93	0,70	0,81

Sumber : BPS Prov. Sumut (diolah)

Perkembangan IPM Sumatera Utara semakin menunjukkan peningkatan. Selama periode 2010 hingga 2017, IPM Sumatera Utara meningkat dari 67,09 pada tahun 2010 menjadi 70,57 pada tahun 2017. Selama periode tersebut, IPM Sumatera Utara rata - rata tumbuh sebesar 0,73 persen per tahun. Pada periode 2016 - 2017, IPM Sumatera Utara tumbuh 0,81 persen.

Selama periode 2010 hingga 2017, IPM Sumatera Utara menunjukkan kemajuan yang besar. Mulai tahun 2016, pembangunan manusia Sumatera Utara termasuk kategori "tinggi" mulai tahun 2016 karena diatas angka 70, sedangkan periode sebelumnya hanya berstatus "sedang".

Peningkatan indikasi kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara dapat dilihat tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap

komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing – masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun

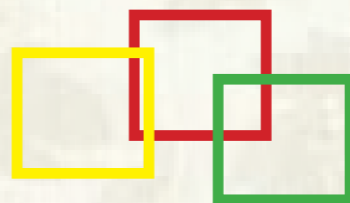
Pada tahun 2017, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Sumatera Utara cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 59,56 (Nias Barat) hingga 79,98 (Medan). Jumlah kabupaten/kota yang berstatus "rendah" berkurang dari 3 kabupaten/kota pada tahun 2016 menjadi 2 kabupaten/kota pada tahun 2017. Jumlah kabupaten/kota yang berstatus "tinggi" bertambah menjadi 15 kabupaten/kota pada tahun 2017. Selama periode 2010 hingga 2017, masih terdapat dua kabupaten yang berstatus pembangunan manusia "rendah", yaitu Kabupaten Nias Barat dan Nias Selatan

**Grafik I.8**  
**IPM Sumatera Utara Menurut Kabupaten/ Kota**  
**dan status Pembangunan Manusia 2017**



Sumber : BPS Prov. Sumut

Capaian pembangunan setiap kabupaten kota tidak lepas dari upaya dan kinerja masing-masing Pemerintah daerah, disamping menggambarkan kondisi daerah tersebut. Kondisi Nias Barat dan Nias Selatan menggambarkan berbagai kondisi yang harus tingkatkan, mulai dari infrastruktur dan program-program yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat



## II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

**Tabel II.1: Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sumatera Utara**  
**s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2017 dan Tahun 2018**

dalam miliar Rp.

Uraian	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>29,299.84</b>	<b>4,795.45</b>	<b>16.37%</b>	<b>31,950.93</b>	<b>4,502.80</b>	<b>14.09%</b>
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	29,299.84	4,795.45	16.37%	31,950.93	4,502.80	14.09%
1. Penerimaan Pajak	28,318.00	4,489.89	15.86%	30,866.62	4,076.67	13.21%
2. PNBPN	981.84	310.02	31.58%	1,084.31	426.13	39.30%
II. HIBAH	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>62,414.28</b>	<b>12,922.76</b>	<b>20.70%</b>	<b>62,680.15</b>	<b>13,301.58</b>	<b>21.22%</b>
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	19,558.21	2,645.12	13.52%	21,750.28	2,729.03	12.55%
1. Belanja Pegawai	7,640.38	1,417.41	18.55%	8,110.18	1,466.02	18.08%
2. Belanja Barang	5,748.66	648.24	11.28%	7,689.30	820.30	10.67%
3. Belanja Modal	6,101.06	578.94	9.49%	5,929.32	442.38	7.46%
4. Belanja Bantuan Sosial	68.11	0.53	0.78%	21.47	0.34	1.56%
II. TRANSFER KE DAERAH DAN D.DES	42,856.06	10,277.64	23.98%	40,929.87	10,572.55	25.83%
1. Transfer ke Daerah	38,658.09	10,277.64	26.59%	37,050.19	10,004.16	27.00%
a. Dana Perimbangan	38,503.88	10,196.79	26.48%	36,921.19	9,948.41	26.94%
1) DAU	24,048.91	7,954.25	33.08%	24,095.78	7,978.34	33.11%
2) DBH	3,421.44	561.23	16.40%	1,971.36	310.69	15.76%
3) DAK	11,033.53	1,681.31	15.24%	10,854.05	1,659.38	15.29%
- DAK Fisik	3,824.61	0.00	0.00%	3,251.64	0.00	0.00%
- DAK Non Fisik	7,208.93	1,681.31	23.32%	7,602.41	1,659.38	21.83%
d. Dana Transfer Lainnya	154.21	80.85	52.43%	129.00	55.75	43.22%
2. Dana Desa	4,197.97	0.00	0.00%	3,879.68	568.38	14.65%
<b>C. SURPLUS DEFISIT</b>		<b>-8,127.31</b>	<b>24.54%</b>	<b>-30,729.21</b>	<b>-8,798.77</b>	<b>28.63%</b>

Sumber : OM SPAN dan SIMTRADA (diolah)

Pendapatan negara tahun 2018 untuk Provinsi Sumatera Utara ditargetkan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 9,5%. Kenaikan target pendapatan ini merupakan salah satu bentuk optimisme meskipun realisasi penerimaan tahun 2017 hanya terealisasi 90%.

Penerimaan pajak masih menjadi sumber utama pendapatan negara dengan kontribusi mencapai 96,6%, sedangkan penerimaan bukan pajak (PNBP) kontribusinya hanya sebesar 3,4%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan negara di Sumatera utara masih ditopang sepenuhnya dari sektor perpajakan.

“Besarnya belanja transfer daripada belanja kementerian menunjukkan kebijakan pemerintah untuk memperkuat konsep desentralisasi fiskal dengan penguatan pembangunan di daerah”

Hingga triwulan I tahun 2018, realisasi pendapatan negara baru mencapai 14,09% dari target yang ditetapkan. Apabila dirinci lebih jauh, penerimaan pajak sebesar 13,21% dan PNBPN sebesar 39,30% dari target masing-masing. Capaian triwulan I ini masih merupakan imbas dari program pengampunan pajak (Tax Amnesty) pada tahun sebelumnya.

Belanja Negara di Sumatera Utara tahun 2018 sebesar Rp. 62,68 triliun dengan komposisi 65,30% belanja transfer dan 34,70% belanja kementerian lembaga menunjukkan kebijakan pemerintah untuk memperkuat konsep desentralisasi fiskal dengan penguatan pembangunan di daerah. Daerah dipacu agar dapat melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, khususnya terkait dengan penyediaan sarana/ prasarana pelayanan dasar masyarakat dan infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi daerah.

Realisasi belanja negara hingga triwulan I sebesar Rp. 13,3 triliun atau 21,22% dari seluruh alokasi anggaran yang merupakan terdiri dari belanja transfer daerah sebesar Rp. 25,83 triliun (65,30%) dan Rp. 2,73 triliun (34,70%). Komposisi ini menunjukkan bahwa dana transfer ke daerah mempunyai potensi yang sangat besar dalam mempengaruhi perekonomian

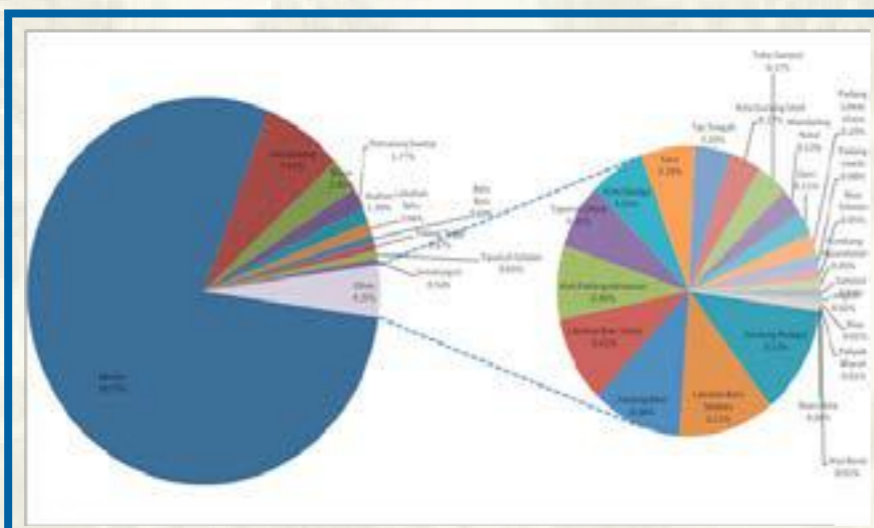
## A. Pendapatan Negara

### 1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan Sumatera Utara triwulan I 2018 sebesar Rp. 4,08 triliun terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp. 3,86 triliun (94,74%) dan pendapatan pajak perdagangan internasional sebesar Rp. 214,5 miliar (5,26%). Komposisi ini sedikit mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dimana komposisinya adalah sebesar 94,05% dan 5,95%.

#### a) Pajak Penghasilan (PPh)

Grafik II.1 Penerimaan PPh Per kabupaten/ Kota Periode triwulan I 2017 dan 2018



Sumber : OM Span, Kanwil DJPSumut I dan Kanwil DJPSumut II (diolah)

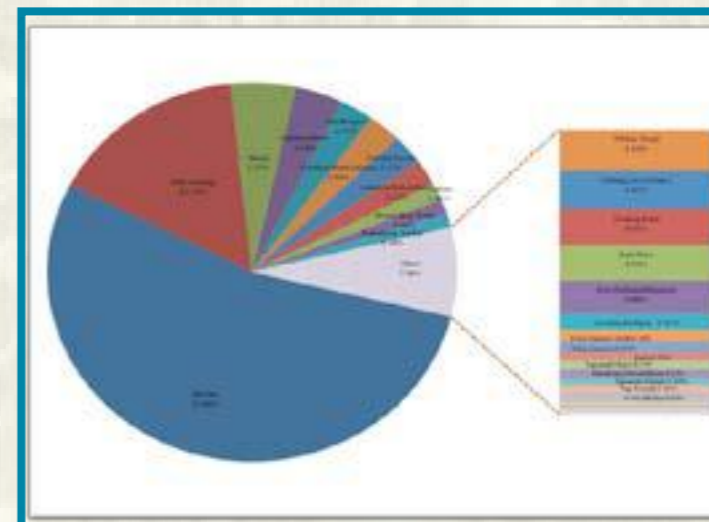
Realisasi Penerimaan PPh triwulan I seluruh Kabupaten/ Kota lingkup Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 2,82 triliun. Penerimaan ini sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penerimaan PPh triwulan I tahun sebelumnya sebesar Rp. 2,85 triliun. Penerimaan PPh 78,77% masih terkonsentrasi di Kota Medan sebesar. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Medan masih menjadi sentral aktivitas perekonomian Sumatera Utara. Selain itu para pelaku usaha masih dominan berada di Kota Medan, meskipun kegiatan usahanya berada di luar medan sehingga menyebabkan secara administrasi penerimaan PPh-nya masuk dalam penerimaan kota Medan.

Realisasi penerimaan PPh sedikit mengalami penurunan sebesar 5,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena pada bulan maret 2017 merupakan batas akhir dari tax amnesty, sehingga wajib pajak berbondong-bondong membayarkan uang tebusan pajak. Sedangkan pada triwulan I 2018 merupakan penerimaan PPh murni dari diaktivitas perekonomian yang memang masih lambat di awal tahun

#### b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerimaan PPN pada triwulan I sebesar Rp. 950,1 miliar, mengalami penurunan sebesar 16,7% jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2017 yang mencapai Rp. 1,14 triliun. PPN terbesar masih di Kota Medan dengan porsi sebesar 53,80%, diikuti oleh Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai. Selain Kota Medan dan Kota Deli Serdang, kontribusi penerimaan PPN pada 31 kabupaten/ kota dibawah 5%.

Grafik II.2 Penerimaan PPN Per kabupaten/ Kota Periode triwulan I 2017 dan 2018



Sumber : OM Span, Kanwil DJPSumut I dan Kanwil DJPSumut II (diolah)

Terdapat 20 kabupaten/ kota dengan kontribusi penerimaan dibawah 1%.

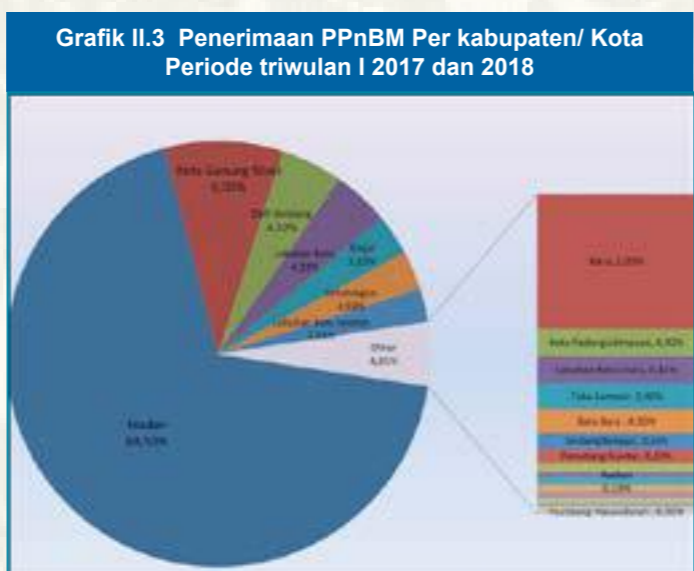
Provinsi Sumatera Utara dengan 33 kabupaten/ kota idealnya kontribusinya pada kisaran 1-3%. Perbedaan kontribusi tersebut menunjukkan masih belum meratanya aktivitas perekonomian di seluruh kabupaten/ kota wilayah Sumatera Utara

Penerimaan PPN berasal dari aktivitas pertukaran barang/ jasa. Untuk Provinsi Sumatera Utara, aktivitas jasa terbesar terjadi di kota Kota Medan, Deli Serdang dan Binjai. Hal inilah yang menyebabkan distribusi terbesar PPN berada di kketiga kota tersebut.

“Terdapat 20 kabupaten/ kota dengan kontribusi penerimaan dibawah 1%. Provinsi Sumatera Utara dengan 33 kabupaten/ kota, kontribusi ideal pada kisaran 1-3%”

c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Penerimaan PPnBM triwulan I 2018 sebesar Rp. 3,931 miliar, sangat jauh jika dibandingkan dengan penerimaan PPnBM pada triwulan I tahun 2017 yang mencapai Rp. 16,91 miliar. Hal ini disebabkan oleh lesunya kegiatan impor barang mewah akibat kenaikan tarif PPnBM berdasarkan PMK nomor 35 tahun 2017 dan diikuti oleh kebijakan selain kebijakan atas impor beresiko tinggi atau impor borongan.



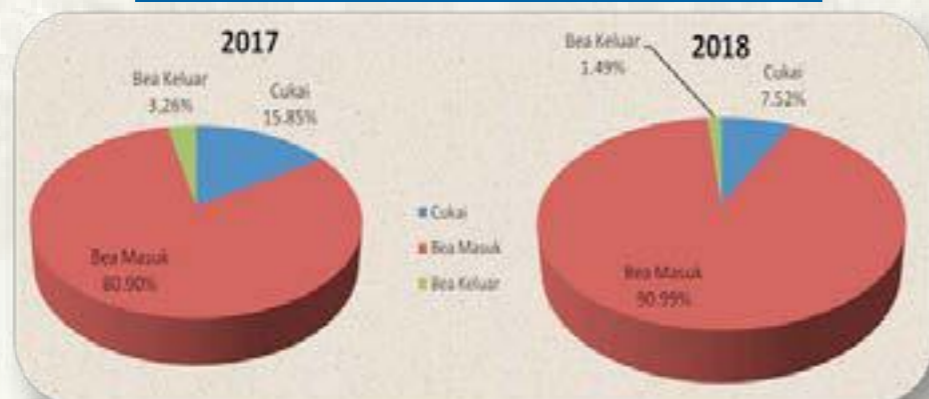
Sumber : OM Span, Kanwil DJPSumut I dan Kanwil DJPSumut II

Distribusi penerimaan PPnBM sebagian besar masih berada di Kota Medan sebesar 68,50 diikuti oleh Kota Gunung Sitoli dan Kab. Deli Serdang. Kota Gunung Sitoli mempunyai penerimaan yang lumayan besar dikarenakan Kota Gunung Sitoli menjadi salah satu tujuan bagi wisatawan manca negara. Kedatangan wisatawan membawa dampak pada konsumsi barang-barang yang menjadi obyek PPnBM

d) Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai

Pendapatan bea masuk, bea keluar dan Cukai merupakan penerimaan pajak perdagangan internasional. Hingga triwulan I tahun 2018, Realisasi Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp 231,9 miliar, turun 27,03,% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Rp. 317,85 miliar

Grafik II.4 Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai triwulan I 2017 dan 2018



Sumber : OM Span, Kanwil DJPSumut I dan Kanwil DJPSumut II

Penerimaan bea masuk masih mendominasi dengan kontribusi mencapai 90,99%. Sedangkan bea keluar dan cukai masing-masing hanya 1.49% dan 7.52%.

Besarnya bea masuk daripada bea keluar menunjukkan bahwa impor masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan ekspor. Hal ini sejalan dengan data yang direlease oleh BPS yang menyatakan bahwa nilai Nilai ekspor Sumatera Utara pada triwulan I 2018 turun 5,16 persen atau menjadi Rp. 2,173 miliar dolar AS akibat turunnya harga jual beberapa produk ekspor. Selain menurun harga karet yang menjadi komoditi ekspor utama, program pembatasan ekspor secara nasional sesuai dengan kesepakatan International Tripartite Rubber Council (ITRC) juga mempengaruhi nilai ekspor Sumatera Utara.

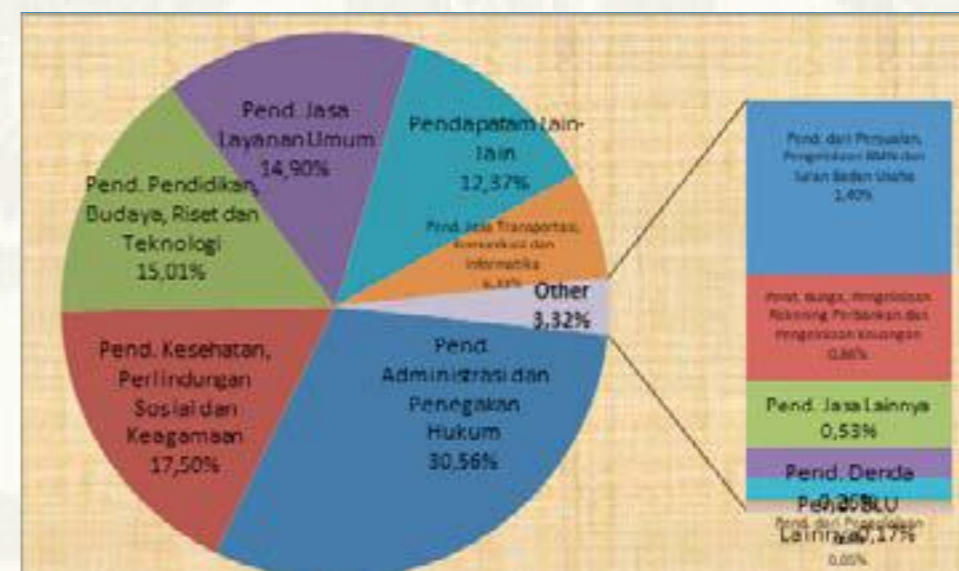
Meskipun kenaikan nilai impor lebih rendah dari nilai ekspor, namun jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2017, mengalami kenaikan sebesar 14,86%. Hal inilah yang menyumbang kenaikan penerimaan bea masuk

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi penerimaan PNBP triwulan I tahun 2018 sebesar Rp. 426,13 miliar, meningkat 37,45% jika dibandingkan dengan penerimaan PNBP triwulan I tahun 2017 sebesar Rp. 310 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa PNBP merupakan sumber penerimaan negara yang masih sangat berpotensi untuk digali lebih banyak disamping penerimaan pajak yang saat ini masih menjadi sumber utama pendapatan negara.

Sumber penerimaan PNBP terbesar berasal dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum yang menyumbang Rp. 130,2miliar atau 30,56% diikuti oleh Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan (17,50%), Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (15,01%) dan Pendapatan Jasa Layanan Umum

Grafik II.5 Penerimaan PNBP triwulan I 2017 dan 2018



Sumber : OM Span (diolah)



a) Penerimaan PNBP dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum

Pendapatan Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum yang menyumbang 30,56% dari total PNBP berasal dari pendapatan pelayanan kepolisian, kejaksaan dan peradilan, akreditasi, pengujian, sertifikasi dan pelayanan administrasi hukum.

Apabila dirinci lebih jauh, pendapatan jasa terbesar adalah pendapatan yang berasal dari pelayanan administrasi kendaraan bermotor (STNK, BPKB) serta Surat Ijin Mengemudi (SIM). Total gabungan pendapatan dari jasa ini mencapai Rp. 82,9 miliar. Besarnya pendapatan ini sebagai dampak pemberlakuan tarif baru untuk administrasi Tanda nomor kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku di Kepolisian. Kenaikan tarif serta banyaknya volume kendaraan bermotor berdampak pada kenaikan PNBP dari jasa kepolisian secara signifikan. Besarnya persentase pendapatan jasa pelayanan rumah sakit menunjukkan banyaknya masyarakat yang berobat ke rumah sakit. Tentunya ini berkaitan dengan tingkat kesehatan di masyarakat.

b) Penerimaan PNBP dari Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan

Pendapatan PNBP dari Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan merupakan penyumbang PNBP terbesar kedua dengan kontribusi sebesar Rp. 74,59miliar. Pendapatan ini berasal sebagian besar dari Pendapatan BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) sebesar Rp. 62,6 miliar (83,95%). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di Provinsi Sumatera utara masih perlu ditingkatkan. Sudah merupakan rahasia umum bahwa masyarakat Sumatera Utara lebih cenderung memilih layanan kesehatan di Malaysia karena dianggap lebih baik. Apabila layanan kesehatan tingkat lanjutan dapat memberikan layanan sebaik di Malaysia, tentunya akan berdampak signifikan terhadap penerimaan negara, karena banyak sektor yang berdampak dari peredaran uang di dalam negeri sendiri

c) Penerimaan PNBP dari dari Pendapatan Pendidikan

Pendapatan biaya pendidikan menyumbang RP. 63,97miliar atau 15,01% dari penerimaan PNBP. Pendapatan ini berasal dari 6 perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, Politeknik Negeri Medan, Universitas Islam Sumatera Utara, Politekes Medan dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan. Dari keenam perguruan tinggi negeri tersebut, hanya satu yang berada di luar Kota Medan. Dengan kondisi ini, Kota Medan selain sebagai pusat perekonomian, juga menjadi tujuan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai 33 kabupaten kota, selain juga bagi provinsi di sekitarnya

d) Penerimaan PNBP dari dari Pendapatan Pendidikan

Pendapatan Pendapatan Layanan Umum menyumbang RP. 63,47miliar atau 14,90% dari penerimaan PNBP. Pendapatan ini terbagi dalam Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (83,16%) dan Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (16,79%). Komposisi ini disebabkan karena dari keempat Badan layanan Umum (BLU) di Sumatera Utara, tiga diantaranya adalah universitas dan satu rumah sakit. Pendapatan ini berasal dari Satker BLU yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, Politeknik Kesehatan Medan

**B. Belanja Negara**

1. Belanja Pemerintah Pusat

**Tabel II.2 Pagu dan realisasi APBN Per Jenis Belanja (dalam miliar rupiah)**

No	Jenis Belanja	s.d Trw I 2017			s.d Trw I 2018		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	7,640.38	1,417.41	18.55%	8,110.18	1,466.02	18.08%
2	Belanja Barang	5,748.66	648.24	11.28%	7,689.30	820.30	10.67%
3	Belanja Modal	6,101.06	578.94	9.49%	5,929.32	442.38	7.46%
4	Belanja Bantuan Sosial	68.11	0.53	0.78%	21.47	0.34	1.56%
<b>Jumlah</b>		<b>19,558.21</b>	<b>2,645.12</b>	<b>13.52%</b>	<b>21,750.28</b>	<b>2,729.03</b>	<b>12.55%</b>

Sumber : OM Span (diolah)

Alokasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Sumatera hingga triwulan I tahun 2018 mempunyai komposisi hampir berimbang antara belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, yaitu berada pada kisaran 30%. Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 21,75 triliun, terbagi dalam belanja pegawai (37,29%), belanja barang (35,35%) dan belanja modal (27,26%). Sedangkan Belanja bantuan sosial hanya 0,10% dari total belanja. Belanja Barang dan belanja modal mengalami perubahan komposisi, dimana pada tahun 2017, persentase belanja modal lebih besar daripada belanja barang.

Pada tahun 2018, Belanja pegawai dan belanja barang mengalami kenaikan, sedangkan Belanja modal mengalami penurunan. Berkurangnya alokasi belanja modal tahun 2018 disebabkan karena proyek-proyek infrastruktur

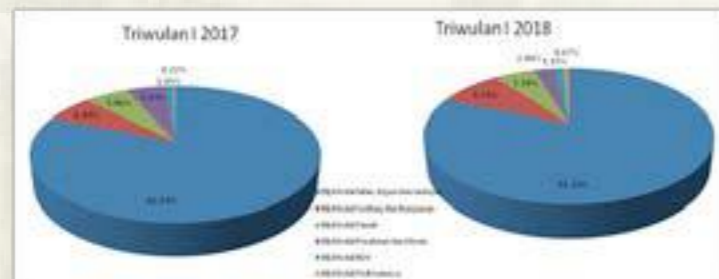
yang dicanangkan pada tahun sebelumnya sudah mulai masuk pada tahap penyelesaian, sehingga alokasi dananya berkurang. Demikian juga halnya dengan belanja bantuan sosial mengalami penurunan.

Persentase kenaikan paling tinggi terjadi pada belanja barang sebesar 33,76%, sedangkan belanja pegawai hanya 6,15%. Kenaikan belanja pegawai sebesar 6,15% semata-mata adalah karena increasing, karena kebijakan pemerintah pada tahun 2018 tidak memberikan kenaikan gaji seperti tahun 2017.

Kenaikan belanja barang sebesar 33,76% dari tahun sebelumnya disebabkan karena peningkatan belanja non operasional dari

sebelumnya Rp. 1,48 triliun menjadi Rp. Rp. 2,33 triliun atau naik sebesar 58,03%. Kenaikan tertinggi lainnya adalah pada belanja perjalanan luar negeri yang mengalami kenaikan sebesar 57,9%. Naiknya belanja perjalanan dinas terjadi karena jumlah kementerian yang mempunyai anggaran tersebut tahun 2018 bertambah dari 6 kementerian menjadi 8 kementerian. Belanja perjalanan dinas pada kementerian pariwisata mengalami kenaikan yang sangat signifikan (160,72%) terkait program menjadikan Sumatera Utara menjadi salah satu destinasi pariwisata tingkat dunia.

**Grafik II.6 Perbandingan alokasi belanja Modal triwulan I 2017 dan 2018**

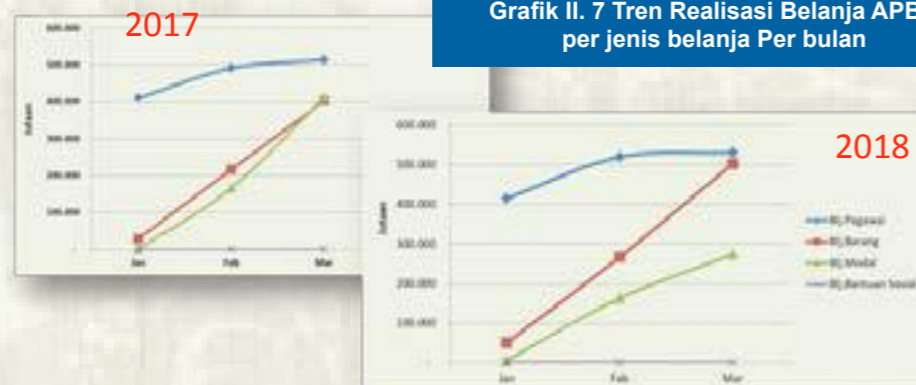


Sumber : OM Span (diolah)

Apabila dilihat peruntukan belanja modal, 78.93% merupakan belanja modal untuk jalan, irigasi dan jaringan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang memfokuskan pembangunan di bidang infrastruktur. Terdapat beberapa proyek infrastruktur berskala besar di Provinsi Sumatera Utara

diantaranya proyek jalan tol Medan – Tebing Tinggi dan Pengembangan infrastruktur menuju kawasan ekonomi khusus (KEK) Sei Mangkei serta beberapa proyek infrastruktur dalam rangka pengembangan kawasan Danau Toba. Kenaikan alokasi belanja modal ini diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi belanja pemerintah pusat hingga triwulan I sebesar Rp. 2,73 triliun atau 12,55%. Realisasi terbesar adalah belanja pegawai dan diikuti oleh belanja barang, belanja modal dan terakhir adalah belanja bantuan sosial. Secara keseluruhan maupun per jenis belanja, capaian realisasi tersebut sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 13,52%. Sedangkan secara nasional, capaian ini masih dibawah target yang ditetapkan yaitu 15%. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan termasuk didalamnya proses bisnis yang baru dalam pengelolaan APBN

**Grafik II. 7 Tren Realisasi Belanja APBN per jenis belanja Per bulan**



Sumber : OM Span (diolah)

Trend penyerapan belanja setiap bulan masih tidak jauh berbeda antara triwulan I tahun 2018 dengan tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi belanja barang paling tinggi jika dibandingkan dengan jenis belanja lainnya. Hal ini menunjukkan pengelolaan anggaran untuk kegiatan operasional lebih baik.

Sedangkan untuk belanja modal, perkembangan realisasi bulanan untuk triwulan I 2018 sedikit melambat jika dibandingkan dengan triwulan I 2017. Perlambatan ini disebabkan pengaruh masih belum Bergeraknya lesunya perekonomian di awal tahun yang berimbas pada penyerapan belanja modal yang sebagian besar melibatkan pihak ketiga.

Pola realisasi seluruh jenis belanja masih mengikuti pola klasik dan karakteristik yang khas setiap jenis belanja. yaitu rendah di awal tahun, selanjutnya naik secara bertahap pada periode selanjutnya .

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

**Tabel II.3 Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (dalam miliar rupiah)**

Uraian	s.d Trw I 2017			s.d Trw I 2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Transfer ke Daerah & Dana Desa	42,856.06	10,277.64	23.98%	40,929.87	10,572.55	25.83%
Dana Perimbangan	38,503.88	10,196.79	26.48%	36,921.19	9,948.41	26.94%
DBH	24,048.91	7,954.25	33.08%	24,095.78	7,978.34	33.11%
DAU	3,421.44	561.23	16.40%	1,971.36	310.69	15.76%
DAK	11,033.53	1,681.31	15.24%	10,854.05	1,659.38	15.29%
- DAK Fisik	3,824.61	0.00	0.00%	3,251.64	0.00	0.00%
- DAK Non Fisik	7,208.93	1,681.31	23.32%	7,602.41	1,659.38	21.83%
Dana Perimbangan	154.21	80.85	52.43%	129.00	55.75	43.22%
Dana Desa	4,197.97	0.00	0.00%	3,879.68	568.38	14.65%

Sumber : Data Monev PA (diolah)

Alokasi Transfer ke daerah dan dana desa untuk Provinsi Sumatra Utara secara keseluruhan hanya mengalami penurunan 4,49% dari sebelumnya Rp. 42,86 triliun menjadu Rp. 40,93 triliun. Selain DAU dan DAK Non Fisik, seluruh komponen dana transfer daerah mengalami penurunan. DAU sedikit mengalami peningkatan sebesar 0.19% menjadi Rp. 24,09 triliun, sedangkan DAK Non Fisik mengalami kenaikan sebesar 5,46% dari sebelumnya menjadi Rp. 7,6 triliun.

Selain DAK Fisik, seluruh dana tranfer sudah terdapat realisasi. Sejak tahun 2017, Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan melalui KPPN Daerah, sedangkan dana transfer lainnya masih melalui KPPN Jakarta II. Sesuai dengan karakteristik masing-masing dana transfer, Realisasi DAU dan Dana Intensif Daerah/ DID (masuk pada Dana Perimbangan) merupakan realisasi terbesar yaitu 33,11% dan 43,22%. Penyaluran DAU dilaksanakan secara rutin setiap bulan, sedangkan DID disalurkan terhadap Pemda yang berhasil memperoleh dan mempertahankan opini WTP tahun sebelumnya sebagai penghargaan atas kinerja

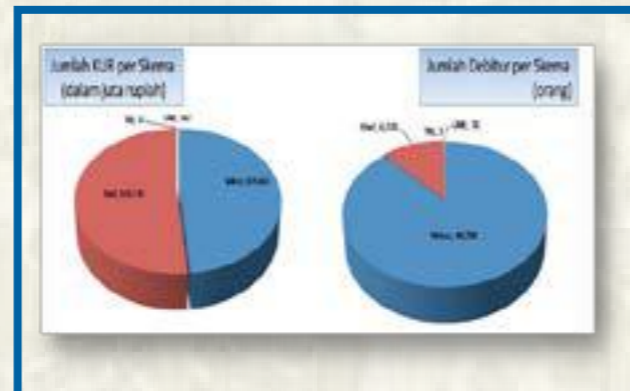
### 3. Manajemen Investasi Pusat

Investasi pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah adalah penerusan pinjaman kepada pemerintah daerah dan BUMD serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat melalui perbankan. Hingga triwulan I 2018, tidak ada perubahan jumlah Penerusan pinjaman kepada pemerintah daerah/ BUMD, karena tidak ada penerusan pinjaman yang baru.

Penyaluran KUR hingga triwulan I 2018 adalah sebesar Rp. 1,69 triliun untuk debitur 55.365 debitur. KUR Ritel masih mendominasi penyaluran KUR sebesar Rp. 870 miliar (51,43%) diikuti oleh KUR Mikro Rp. 821 miliar (48,53%). Hal menunjukkan pelaku UMKM di sektor ritel merupakan debitur terbesar penerima KUR

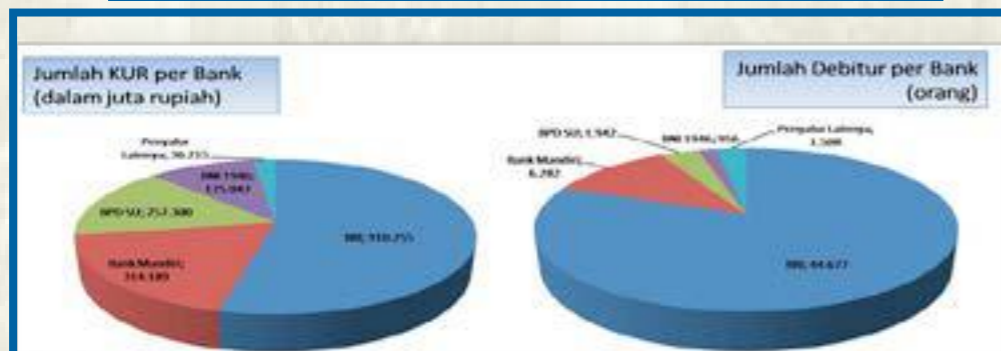
Namun demikian, jika dilihat dari sisi debitur, jumlah debitur KUR ritel dan KUR mikro ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah kredit yang diterimanya. Dari 55.365 debitur KUR, 48.708 (87,98%) debitur adalah penerima KUR mikro, sedangkan KUR ritel hanya sebanyak 6.578 debitur.

**Grafik II.8 Jumlah Penyaluran KUR dan debitur berdasarkan skema di Wilayah Sumatera Utara TW I Tahun 2018**



Sumber : SIKP, Kemenkeu (diolah)

**Grafik II.9 Jumlah Penyaluran KUR dan debitur berdasarkan Bank Penyalur Triwulan II Tahun 2018**



Sumber : SIKP, Kemenkeu (diolah)

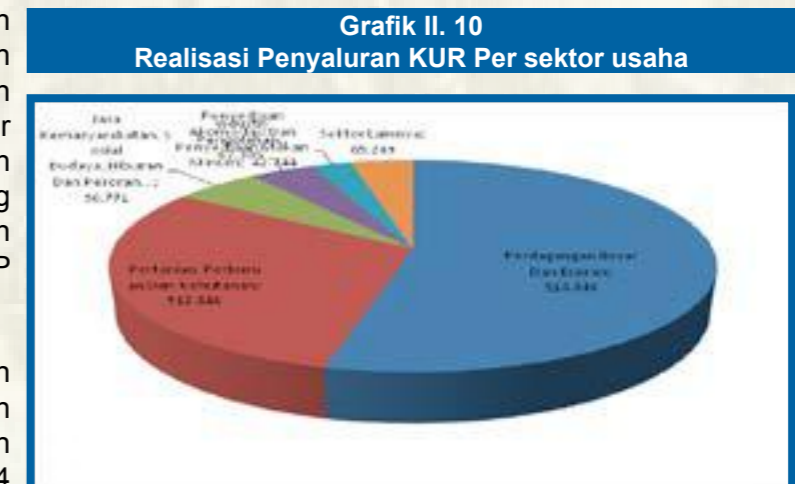
Penyaluran KUR dilaksanakan melalui beberapa bank penyalur. BRI menyalurkan KUR sebesar Rp. 910 miliar atau (53,77%) diikuti selanjutnya oleh Bank Mandiri (18,56%) dan BPD Sumut (15,20%). Dari jumlah debitur, 80% debitur KUR adalah debitur KUR melalui BRI. Sedangkan debitur mandiri sebanyak 11,35% dari total debitur.



Perbandingan terbalik antara jumlah dana yang tersalurkan dengan jumlah debitur menunjukkan jumlah potensi UMKP yang dapat dikembangkan dan komposisi pelaku UMKP di sektor ritel dan mikro.

Sektor Perdagangan besar dan Eceran masih mendominasi penyaluran KUR sebanyak Rp. 914 miliar (53,99%) dengan jumlah debitur sebanyak 27.927 (50,44%), diikuti oleh sektor Pertanian, Perburuhan dan Kehutanan sebesar dan Kehutanan sebesar Rp. 512 miliar (30,29%). Terdapat korelasi antara jumlah kredit dengan jumlah debitur.

Sektor kreatif yaitu Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, dan Hiburan juga belum optimal dikembangkan. Hal ini terlihat dari penyaluran KUR pada sektor ini yang hanya Rp. 5,01%.

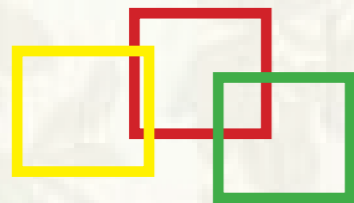


Sumber : SIKP, Kemenkeu (diolah)

### C. Prognosis Realisasi APBN

Rendahnya realisasi pada awal tahun, baik penerimaan maupun belanja negara merupakan hal yang wajar. Belum bergairahnya aktivitas perekonomian menjadi penyebab utama rendahnya penerimaan negara. Diperkirakan pada periode berikutnya, penerimaan negara akan meningkat seiring dengan meningkatkan aktivitas perekonomian.

Realisasi belanja negara juga mengikuti pola sesuai dengan karakteristik setiap jenis belanja. Diperkirakan realisasi belanja akan meningkat di triwulan II yang dipicu oleh hari besar keagamaan. Sebagian besar satuan kerja akan lebih banyak melakukan pencairan dana menjelang lebaran



### III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

APBD lingkup Provinsi Sumatera Utara pada TA 2018 sebesar Rp58,012 triliun atau lebih rendah 0,21% dari Tahun 2017. Alokasi dana yang tersedia diharapkan dapat meningkatkan perputaran ekonomi di Sumatera Utara

**Tabel III.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sumatera Utara s.d Akhir Triwulan I Tahun 2016 dan 2017**

dalam Rupiah

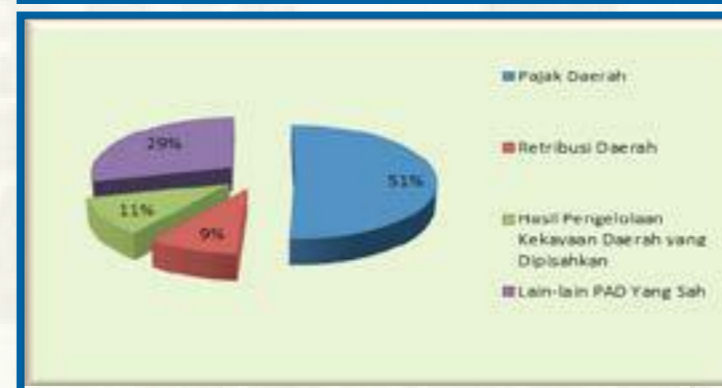
Uraian	Pagu 2017	Realisasi 2017
<b>PENDAPATAN</b>	52,012,708,987,884	14,177,927,435,813
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	2,155,172,439,726	4,724,899,836,993
Pendapatan Pajak Daerah	8,179,914,995,803	2,404,053,626,552
Pendapatan Retribusi Daerah	768,830,436,802	444,015,936,879
Pend. Hasil Pengelolaan Kekayaan yg Dipisahkan	623,215,885,629	508,851,460,900
Lain-lain PAD Yang Sah	2,583,211,121,492	1,367,978,812,662
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	38,513,831,749,253	7,769,700,596,647
Dana Transfer Umum	25.699.256.032.165	5.898.296.161.332
Dana Transfer Khusus	9,705,243,997,000	459,979,776,000
Transfer Lainnya	1.037.796.294.000	973.963.517.000
Transfer Pemerintah Provinsi	1.717.035.426.088	469.919.036.315
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	1,343,704,798,905	1,683,327,002,173
Pendapatan Hibah	662,406,433,907	376,423,860,200
Pendapatan Dana Darurat	259,242,614,000	-
Pendapatan Lainnya	911,004,512,185	1,306,903,141,973
<b>BELANJA</b>	53,689,143,253,379	16,189,221,706,049
Belanja Pegawai	21,962,165,245,093	7,004,252,972,416
Belanja Barang	13,006,441,141,592	4,319,816,252,279
Belanja Bunga	20,117,833,242	5,000,000
Belanja Subsidi	713,670,519,374	2,029,834,200
Belanja Hibah	4,345,774,019,745	325,008,243,400
Belanja Bantuan Sosial	243,014,996,000	99,359,815,800
Belanja Bantuan Keuangan	2,599,304,498,794	635,348,926,758
Belanja Modal	10,661,773,786,002	3,697,198,447,659
Belanja Tidak Terduga	136,881,213,537	106,202,213,537
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	2.611.551.577.277	1.525.304.499.674
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	(3,422,218,514,127)	(3,536,598,769,910)

Sumber : LKPD Kab/ Kota (diolah)

Realisasi Pendapaatan APBD di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan triwulan I mencapai 27,26 persen sedangkan Belanja sebesar 31,95 persen. Realisasi Pendapatan secara keseluruhan tetap didominasi oleh Pendapatan Transfer sebesar 54,80 persen dengan komposisi penerimaan DAU sebesar 59,62 persen. Dibandingkan dengan Penerimaan dari PAD yang hanya 65,96 persen maka Pendapatan Transfer menunjukkan ketergantungan sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat masih tinggi. Sedangkan Belanja secara umum masih didominasi oleh Belanja Operasi sebesar 91,38 persen dengan komposisi Belanja Pegawai sebesar 43,26 persen

#### A. Pendapatan Daerah

**Grafik III.1 Komposisi dan Sumber PAD di Provinsi Sumut TW I TA 2018**



Sumber : LKPD Kab/ Kota (diolah)

Secara keseluruhan penerimaan PAD di seluruh Sumatera Utara lebih banyak bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar 51 persen yang utamanya berasal dari jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan PBB

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan triwulan I dengan penerimaan tertinggi dari Pemprov Sumatera Utara yang menyumbang sebesar 63,66 persen.

PAD terbesar pada Pemprov. Sumatera Utara berasal dari Pajak Daerah sebesar 51 persen, Retribusi Daerah sebesar 9 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 11 persen dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 29 persen

#### a). Pajak Daerah

**Grafik III.2. Komposisi Pendapatan Pajak Prov. Sumut Trw I 2018**

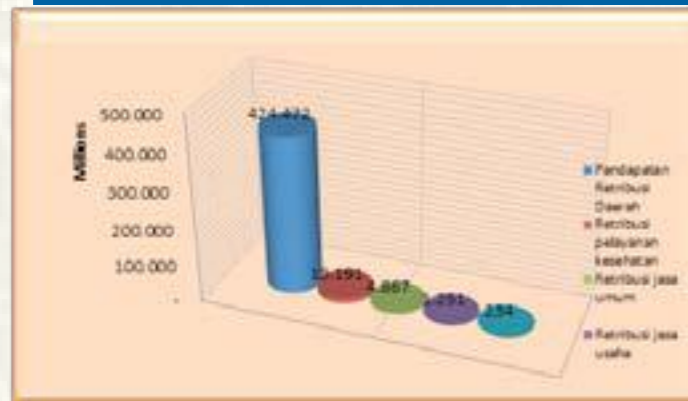


Sumber : LKPD Kab/ Kota (diolah)

Penerimaan Pajak Daerah di Sumatera Utara tetap didominasi oleh Pemprov Sumatera Utara disusul Kab. Deli Serdang dan Kab. Serdang Bedagai, Kota Binjai dan Kota Medan. Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara lebih banyak bersumber Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan serta Pajak Rokok

b) Penerimaan Retribusi Daerah

Grafik III.3. Pendapatan Retribusi Prov. Sumut Tw I 2018



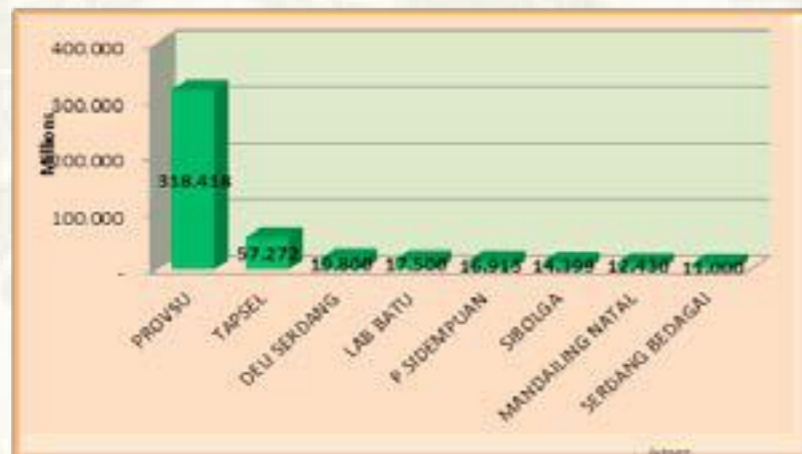
Sumber : LKPD Kab/ Kota (diolah)

Penerimaan Retribusi di wilayah Sumatera Utara umumnya berasal dari Parkir, Pasar dan Terminal. Kab. Langkat penerima retribusi kedua terbesar setelah Kota Medan

c) Hasil Kekayaan Dipisahkan

Grafik III.4. Tujuh daerah dengan realisasi kekayaan dipisahkan Terbesar Lingkup Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2018

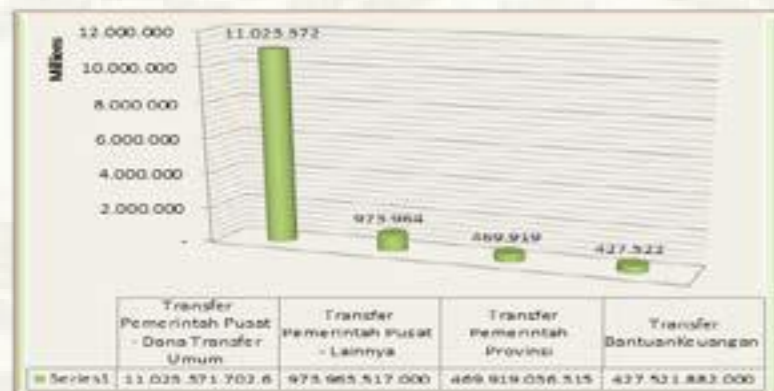
Penerimaan yang berasal dari kekayaan dipisahkan berasal dari BUMD yang dikelola oleh Pemda dan terbesar diterima oleh Pemkot Medan. Hal tersebut disebabkan Kota Medan memiliki BUMD lebih banyak dari daerah lainnya dengan BUMD sebanyak 12 buah



Sumber : LKPD Kab/ Kota (diolah)

2. Pendapatan Transfer

Grafik III.5. Realisasi Pendapatan Transfer berdasarkan Jenis Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2018



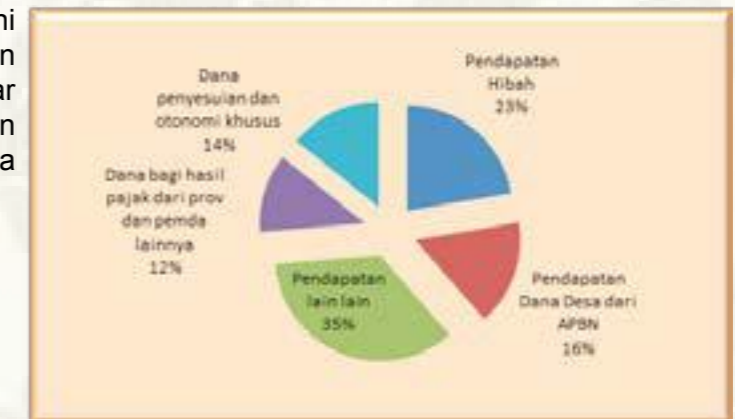
Penerimaan transfer di Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh jenis Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar 85,49 persendari total penerimaan transfer sebesar Rp12,89 triliun. Penerimaan dari jenis ini didominasi oleh Dana Alokasi Umum sebesar 46,49 persen atau sebesar Rp5,125 triliun

Sumber : LKPD Kab/ Kota (diolah)

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan tertinggi dari jenis ini yakni Pendapatan Lainnya sebesar 35 persen dan Pendapatan Dana Desa dari APBN

Grafik III.6. Realisasi Pendapatan lainnya Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2018



Sumber : LKPD Kab/ Kota (diolah)

B. Belanja Daerah

1. Belanja Operasi

Pengeluaran di Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh Belanja Operasi sebesar 77,59 persen dengan pengeluaran terbesar dari Belanja Pegawai sebesar 56,55 persen

Grafik III.7. Realisasi Belanja Operasi Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2017



Sumber : LKPD Kab/ Kota (diolah)

Grafik III.8. Realisasi Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2018



Sumber : LKPD Kab/ Kota (diolah)

2. Belanja Modal

Pengeluaran untuk pembentukan aset di Provinsi Sumatera Utara sebesar 12 persen dengan pengeluran terbesar berada pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 54,62 persen kemudian diikuti oleh Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 27,08 persen

### 3.. Belanja Tak Terduga

Belanja ini terdapat pada 27 Pemda dengan jumlah seluruh Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp106.202.213.537.

**Grafik III.9. 5 Alokasi terbesar Triwulan belanja tak terduga triwulan I tahun 2018**



Sumber : LKPD Kab/ Kota (diolah)

### C. Prognosis Realisasi APBD

#### 1. Prognosis Pendapatan

Capaian Realisasi Pendapatan selama 6 tahun terakhir cenderung sama yakni sekitar 90%. Berdasarkan trend tersebut maka prognosis pendapatan di Provinsi Sumatera Utara diasumsikan sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 90% dari target atau sebesar Rp49,72 triliun

**Tabel III.2. Trend Realisasi Pendapatan 5 Tahun**

Tahun	Pendapatan		% Capaian
	Target	Real	
2014	41.184.140	37.602.240	91,3
2015	45.922.236	41.747.487	90,9
2016	56.710.000	50.922.640	89,8
2017	54.260.000	48.834.000	90
2018	5.254.000	49.728.600	90

#### 2. Prognosis Belanja

Tahun	Belanja		% Capaian
	Target	Real	
2013	40.982.484	28.000.457	68,32
2014	43.201.160	33.606.868	77,8
2015	43.461.059	35.203.458	81,0
2016	54.761.000	46.014.000	84,0
2017	55.117.000	47.400.620	86,0

Melihat data realisasi tahun 2013 s.d tahun 2017 terdapat trend kenaikan realisasi belanja rata rata sebesar 2 persen setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut prognosis belanja di Provinsi Sumut sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar Rp49,52 triliun atau 89,48% dari target tahun 2018.

## IV

### PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

#### A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Untuk melihat kapastiras fiskal disuatu wilayah maka diperlukan informasi keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD. Meskipun sebagian sumber APBD berasal dari APBN dalam bentuk transfer ke daerah namun jumlah alokasi tersebut tidaklah tumpang tindih. Untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang keuangan di suatu wilayah daerah maka diperlukan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK).

**Tabel IV.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Utara s.d. Triwulan I Tahun 2018 (dalam Juta Rupiah)**

Uraian	2017				2018
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	4,502,804	12,461,482	6,391,741	8.56%	5,887,733
Pendapatan Perpajakan	4,076,674	1,483,204	5,559,879	6.78%	5,206,841
Pendapatan Bukan Pajak	426,129	392,485	818,614	21.67%	672,798
Hibah	0	13,248	13,248	63.68%	8,094
Transfer	0	10,572,545	0	0.00%	0
Belanja Negara	13,301,577	5,248,501	7,977,532	5.57%	7,556,535
Belanja Pemerintah	2,729,032	5,158,242	7,887,273	5.79%	7,455,458
Transfer	10,572,545	90,259	90,259	-10.70%	101,077
Surplus/(Defisit)	(8,798,773)	7,212,981	(1,585,791)	-4.97%	(1,668,802)
Pembiayaan	0	1,165,714	1,165,714	3.28%	874,632
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0	1,208,063	1,208,063	34.17%	900,376
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	42,349	42,349	64.50%	25,744
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	(8,798,773)	8,378,695	(420,078)	-47.10%	(794,170)

Catatan:

\*) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah

#### B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

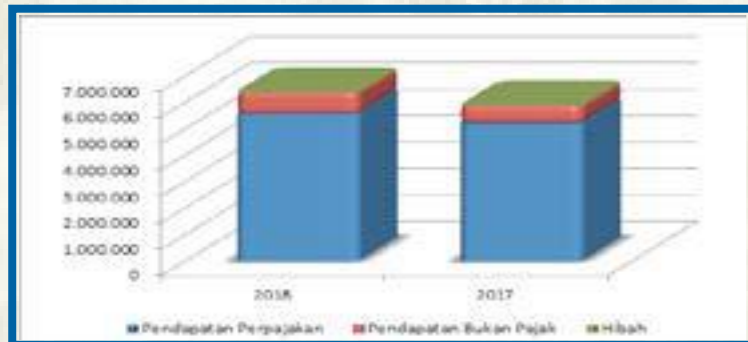
Pendapatan Pemerintahan Umum (*General Government Revenue*) atau Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah Triwulan I tahun 2018 sebesar Rp.6.39 triliun dengan komposisi 86,99 persen berasal dari penerimaan perpajakan dan diikuti selanjutnya oleh PNPB sebesar 12,81 persen, dan Hibah sebesar 0,21 persen. Pendapatan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah pada laporan konsolidasi ini dieliminasi, sebagaimana Belanja transfer pada pos belanja negara

## 1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pendapatan pajak masih merupakan porsi terbesar dari pendapatan di Provinsi Sumatera Utara dengan porsi sebesar 86,99 persen meningkat 6,78 persen apabila dibandingkan dengan triwulan I tahun 2017. Sedangkan komposisi PNBPN mengalami kenaikan sebesar 21,67 persen. Penerimaan Hibah Triwulan I 2018 mengalami kenaikan sebesar 63,68 persen dibandingkan tahun lalu. Kenaikan ini disebabkan karena jumlah daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2018 bertambah dari 2 daerah menjadi 9 daerah, yang terdiri dari 1 Pemilihan Gubernur, 1 Pemilihan Walikota dan 7 pemilihan bupati.

Pendapatan transfer hanya terdapat pada pemerintah daerah, yaitu penerimaan dana transfer ke daerah berupa DAU, DAK, DBH dan Dana Desa. Meskipun terdapat pendapatan transfer di pemerintah daerah, namun pendapatan ini pada laporan konsolidasian dieliminasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari

**Grafik IV.1 : Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Sumatera Utara s.d. triwulan I Tahun 2017 - 2018**

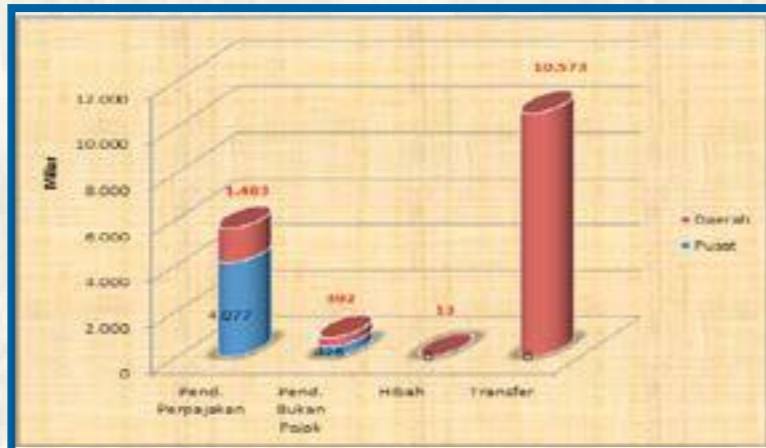


Sumber : LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Pendapatan perpajakan pada laporan konsolidasian masih didominasi oleh pajak-pajak pemerintah pusat sedangkan Pajak Daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menunjukkan pengaruh yang besar bagi pendapatan daerah. Namun demikian, keduanya masih bisa digali lebih dalam untuk peningkatan penerimaan negara, khususnya Pendapatan Asli Daerah. Realisasi pendapatan pajak setiap tahun masih berada

dikisaran 90% dari target yang ditetapkan. Selain itu, tax ratio Provinsi Sumatera Utara untuk triwulan I sebesar 3,13%, masih jauh di bawah tax ratio nasional tahun 2017 sebesar 8,4%. Kenaikan PNBPN yang lebih besar dari penerimaan perpajakan sebesar 21,67 persen, mempunyai komposisi yang hampir seimbang antara PNBPN Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sumber-sumber PNBPN masih belum optimal digali.

**Grafik IV.2 : Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Sumut triwulan I Tahun 2018**



Sumber : LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Penerimaan transfer masih merupakan sumber pendapatan utama bagi daerah karena PAD dan Dana Bagi Hasil masih belum dapat menunjang kemandirian fiskal pemda. Hal ini sejalan dengan masih rendahnya PAD hampir di seluruh pemerintah daerah. pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai PAD terbesar yang berasal dari pajak kendaraan bermotor, sedangkan untuk kabupaten kota, PAD terbesar adalah Kota Medan.

## 2. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Peningkatan penerimaan sebesar 8,48 persen berasal dari penerimaan pajak dan PNBPN. Persentase kenaikan PNBPN lebih tinggi dari persentase penerimaan pajak. Sumber utama peningkatan PNBPN berasal dari biaya administrasi kendaraan

**Tabel IV.2 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dan 2018**

Uraian	2016	2017	Kenaikan
	Realisasi (Jutaan)	Realisasi (Jutaan)	
Penerimaan Perpajakan	5,559,879	5,206,841	6.78%
PNBPN	818,614	672,798	21.67%
Total	6,378,492	5,879,639	8.48%
PDRB (Juta Rp)*	177,618,651.52	164,421,506.27	8.03%

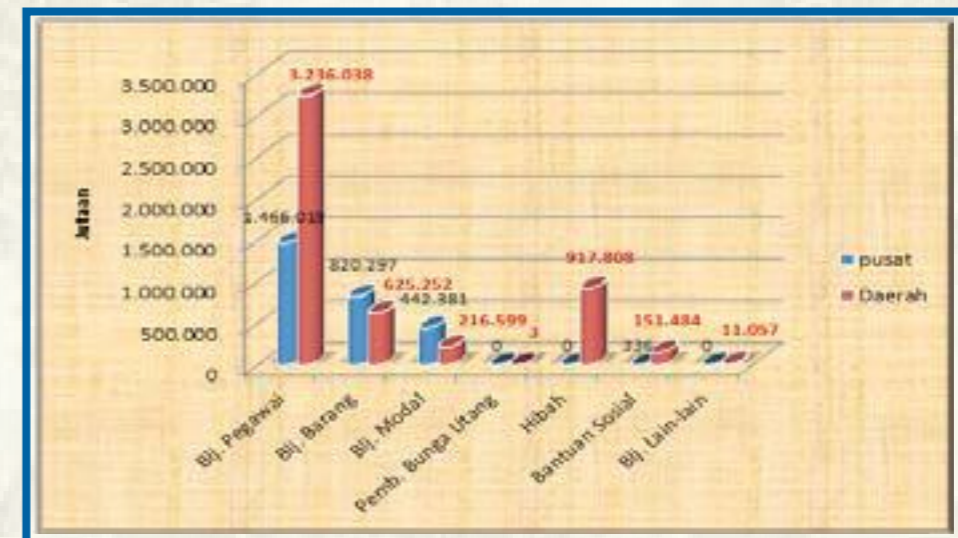
Sumber : LKPK Kanwil DJPB (diolah), BPS Prov. Sumut bermotor (SIM, TNKB, dan BPKB).

PDRB Sumatera Utara triwulan I tercatat Rp. 177,62 triliun, meningkat 8,03 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Persentase kenaikan penerimaan negara sedikit lebih tinggi dari persentase pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan masih adanya potensi penerimaan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang belum dioptimalkan, baik oleh aparat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun secara umum pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara berpengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan konsolidasian

## C. BELANJA KONSOLIDASIAN

### 1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

**Grafik IV.3 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018**

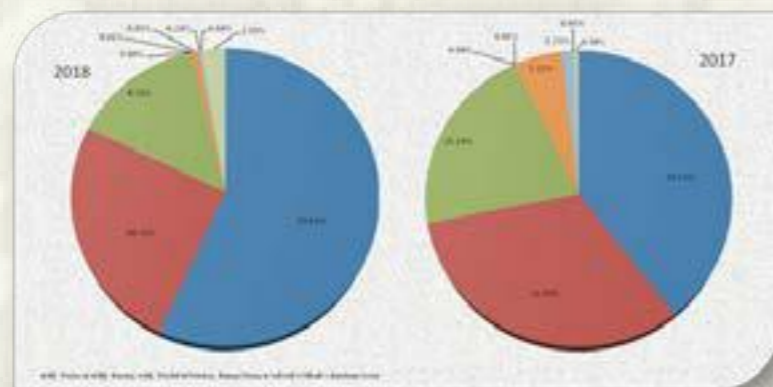


Sumber : LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja), Komposisi pengeluaran pemerintah triwulan I tahun 2018 secara umum hampir sama, yaitu realisasi belanja pegawai yang lebih besar jika dibandingkan dengan belanja yang lainnya.

Selain belanja pegawai, terdapat perbedaan yang mencolok antara Pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah daerah. Realisasi belanja barang pada pemerintah pusat sebesar 30% masih ideal, sedangkan untuk pemerintah daerah, realisasi belanja barang sebesar 12,12% sangat jauh dari kondisi ideal. Hal ini menunjukkan bahwa untuk pengeluaran operasional kantor yang merupakan belanja rutin, pemerintah daerah masih belum optimal. Hal ini disebabkan masalah administrasi serta adanya perubahan pengelola keuangan pada OPD. Jika pada instansi pemerintah pusat realisasi belanja sudah bisa dimulai sejak awal bulan Januari, sedangkan pada pemerintah daerah belum bisa dilaksanakan karena masih terdapat serangkaian administrasi di setiap OPD.

## 2. Analisis Perubahan



Komposisi belanja konsolidasian triwulan I tahun 2018 didominasi oleh belanja pegawai sebesar 59,62 persen, diikuti oleh belanja barang dan belanja modal. Komposisi ini sedikit berbeda tahun 2017 dimana komposisi belanja konsolidasian triwulan I hampir berimbang antara belanja pegawai dan belanja barang.

Perubahan komposisi realisasi ini disebabkan oleh karakteristik belanja pegawai yang sudah pasti waktu pembayaran dan persyaratannya, sehingga sudah bisa dilaksanakan seawal mungkin di bulan Januari 2018. sedangkan belanja lainnya berhubungan dengan pihak ketiga sebagai rekanan sehingga memerlukan waktu dalam pemenuhan persyaratan administrasi pembayaran.

### A. Kapal Pesiar Dream Cruise is not A Dream Anymore



Pada tanggal 5 April 2018 lalu, untuk pertama kalinya sebuah kapal pesiar MV Superstar Libra merapat di Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Kapal pesiar ini dimiliki dan dioperasikan oleh Star Cruise, sebagai anak perusahaan dari Genting Group Malaysia. Star Cruise adalah perusahaan kapal pesiar yang berbasis di Asia dan merupakan salah satu perusahaan kapal pesiar yang memiliki pertumbuhan tercepat di dunia. Kapal yang memiliki panjang 216 meter ini membawa 800 awak kapal dan 500 wisatawan asing dari Malaysia, Singapura, dan Australia. Selama berada di Sumatera Utara penumpang Superstar Libra dibawa berdarmawisata ke Danau Toba dan melakukan wisata kota disekitarnya.

Tentu hal ini merupakan kabar gembira bagi industri pariwisata di daerah sekitar Danau Toba dan juga merupakan potensi wisata di sekitar Kuala Tanjung, pelabuhan tempat merapatnya Superstar Libra. Kunjungan kapal pesiar Superstar Libra masih merupakan uji coba pada pelabuhan baru Kuala Tanjung.

Saat ini proses pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung telah mencapai angka 96,33 persen. Juga sedang dikerjakan pembangunan jetty dengan ukuran 500 m x 60 m yang sangat ideal untuk berlabuhnya cruise. Hal ini sesuai dengan target pemerintah dalam mewujudkan program tol laut untuk menjadikan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub internasional di kawasan barat. Total investasi pembangunan pelabuhan ini mencapai Rp 34 triliun dimana pembangunan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2023.

Pelabuhan Kuala Tanjung ini akan menjadi pintu masuk strategis bagi wisatawan mancanegara selain Pelabuhan Belawan. Selain Danau Toba, banyak destinasi pantai di sekitar Batubara, tetapi masih butuh pengembangan sarana dan fasilitas bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Sangat disayangkan apabila kapal pesiar ini hanya sebagai tempat berlabuh untuk wisatawan melanjutkan perjalanan ke Danau Toba.

Untuk kawasan Danau Toba, dengan keberadaan kapal pesiar ini, tentu sangat dibutuhkan akomodasi bagi wisatawan. Terdapat beberapa penginapan yang sangat beragam mulai dari yang murah hingga hotel berbintang yang menyediakan fasilitas seperti wifi, kolam renang dan parkir. di sekitar Danau Toba. Tersebar di Pulau Samosir, Parapat dan dekat Pelabuhan Udara Silangit. Untuk telekomunikasi, tiga operator sudah menebar sinyal 4G di kawasan Parapat hingga Samosir sehingga wisatawan bisa mengakses internet dengan nyaman.



Tak kalah penting adalah sistem pembuangan sanitasi. Danau Toba kini mulai berubah. Telah dibangun toilet umum pertama kelas bintang lima dengan seluruh kelengkapan yang tersedia secara higienis. Teknologinya menggunakan Panel Blue Energy yang hemat listrik dilengkapi dengan material yang tertata rapi. Toilet bintang lima ini telah dibangun di Tomok Samosir, Ajibata Tobasa dan Muara Tapanuli Utara. Sehingga tidak akan ditemui tisu berserakan, jejak kaki penuh tanah di lantai, bahkan air kran yang tidak mengalir.

Dengan merapatnya Superstar Libra di Pelabuhan Kuala Tanjung dan membawa wisatawan mancanegara ke Danau Toba, peningkatan jumlah turis akan berdampak pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten tersebut.

## B. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Dulu dan Sekarang

### Dulu,

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikondisikan untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan. KEK Sei Mangkei ditujukan sebagai industri pengolahan kepala sawit dan industri pengolahan karet sebagai kegiatan utama.

KEK Sei Mangkei berlokasi di Bosar Maligas, Sei Mangkei, Simalungun, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Secara operasional diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2015, terhitung lama sejak Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2012 tentang KEK Sei

Penting bagi industri pariwisata Indonesia untuk meningkatkan kontribusinya pada Produk Domestik Bruto (PDB) karena hal ini akan memicu lebih banyak pendapatan devisa. Diharapkan tingkat pengangguran di Indonesia akan menurun dengan meningkatnya pendapatan disektor pariwisata, khususnya di Sumatera Utara. Terlebih Danau Toba merupakan salah satu destinasi prioritas kelas dunia. Pada tahun 2019, Kementerian Pariwisata menargetkan dapat mendatangkan satu juta wisatawan mancanegara dan 10 juta wisatawan nusantara.

Bila uji coba ini berhasil, Genting Cruise Lines sebagai induk perusahaan dari Superstar Libra berkomitmen akan rutin seminggu sekali membawa wisatawan mancanegara ke Pelabuhan Kuala Tanjung, demikian pernyataan Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) Arie Prasetyo.

Mangkei ini dikeluarkan pada 27 Februari 2012 di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebagai investor pioneer, PT. Unilever Oliochemical Indonesia (UOI) melakukan nilai investasi sebesar Rp. 2 triliun. Kurun waktu 2012 – 2015 nyaris minim pengembangan infrastruktur pendukung operasional KEK ini, seperti suplai listrik, jalan lingkungan, jaringan rel yang telah dimulai namun tak kunjung selesai, jalan tol serta ketersediaan gas.

Pembangunan Gardu Induk PT. PLN baru beroperasi pada tahun 2016. Untuk pembangunan Dry Port, jalan lingkungan dan tangki terminal Crued Palm Oil (CPO) dikerjakan oleh Kementerian Perindustrian. Pada saat itu pembangunan terhambat karena kelangkaan pasokan semen. Jalan di

dalam KEK Sei Mangkei selesai pada tahun 2016 sedangkan jalan akses dari arah Medan masih menggunakan jalan lintas timur sumatera yang tidak memadai dan cenderung macet. Jalur air melalui Pelabuhan Belawan jaraknya jauh akibat Pelabuhan Kuala Tanjung masih terhambat pembangunannya. Untuk pengolahan air limbah, telekomunikasi dan air bersih tidak bermasalah.

### Sekarang,

Awal tahun 2018, PT. Alternative Protein Indonesia (API) melakukan peletakan batu pertama konstruksi fisik dan direncanakan selesai awal tahun 2019. API membangun pabrik protein dengan sistem memelihara serangga hingga bertelur dan dikembangkan menjadi protein. Serangga-serangga tersebut banyak ditemukan dari tandan kosong kelapa sawit. Perusahaan ini menanamkan modal senilai US\$500 juta (Rp.6,65 triliun) dan dilakukan secara bertahap (Liputan6, Mei 2017). Pengelolaan KEK Sei Mangkei tetap dipegang oleh PTPN III sebagai holding perkebunan milik negara.

PT. API akan melakukan pembangunan *insect bioreactor* (IBR) untuk pengembangbiakan serangga Black Soldier Fly. Serangga ini menghasilkan produk protein alternative sebagai bahan pakan ternak (feed) dan bahan pangan (food) di Indonesia. Hal ini merupakan industri baru di Indonesia. Peternakannya ada di Eropa, di KEK Sei Mangkei pengembangan saja karena protein dari sini akan dikirim lagi untuk breeding lalu dipasarkan. PT. API menggunakan bahan baku alternative protein serangga yakni tandan kosong kelapa sawit maupun bungkil sawit yang banyak terdapat di Sumatera Utara.

Dengan komitmen sebesar ini, banyak hal yang harus diperhatikan pemerintah khususnya infrastruktur. Pembangunan jalur kereta Sei Mangkei sepanjang 2,95 km ditandai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dan PTPN III (Persero). Pembangunan jalur kereta api Sei Mangkei – Perlanaan merupakan bagian dari terwujudnya jalur KA yang akan menghubungkan KEK Sei Mangkei menuju Pelabuhan Kuala Tanjung. Jalur kereta Bandar Tinggi – Kuala Tanjung juga ditargetkan beroperasi pada tahun ini.

Soft opening Pelabuhan Kuala Tanjung pada bulan April 2018 diharapkan mendukung konektivitas KEK Sei Mangkei. Beroperasinya Pelabuhan Kuala Tanjung yang terintegrasi dengan jalur kereta api diharapkan dapat menarik investor.

Sungguh luar biasa potensi alam Sumatera Utara. Sungguh suatu anugerah bagi masyarakat Sumatera Utara. Diharapkan pembangunan yang dilakukan pemerintah serta masyarakat yang menyadari potensi besar ini bisa membuat Sumatera Utara menjadi propinsi yang berkelas internasional dan dikenal dari berbagai penjuru Negara.

